

RENCANA AKSI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohim, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya sehingga tersusunnya rencana aksi atas kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Rencana Aksi Kinerja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tinjauan atas Laporan Kinerja.

Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Rencana kinerja selain untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2024 dan perbaikan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2024

KEPALA DINAS,



BAMBANG SUMBOGO, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19710422 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 RUANG LINGKUP.....	3
BAB II	4
GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN.....	4
2.1 TUGAS DAN FUNGSI	4
2.3 SUMBER DAYA KEPEGAWAIAN	7
2.4 ASET/MODAL	9
2.5 KINERJA PELAYANAN.....	11
2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGANPELAYANAN	18
2.7 RENCANA AKSI TAHUN 2024.....	23
PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi Perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi Lampung di Bidang Perhubungan, struktur organisasi yang semula bidangnya berorientasi pada moda transportasi (darat, laut, udara, dan perkeretaapian) sekarang berubah menjadi fungsi transportasi yang memungkinkan dalam satu bidang dapat terdiri dari moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terbitlah aturan yang mengatur perubahan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan dikeluarnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang hingga pada tahun 2021 telah disempurnakan kembali kedalam peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021.

Program kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, terkait dengan pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor:25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor:23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Listansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tinjauan atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Lampung nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 dan tolak ukur pencapaian target sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun anggaran 2024 antara lain:

1. Melaksanakan amanah Peraturan Menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknik penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tinjauan atas laporan kinerja;
2. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawaban;
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja yang berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung meliputi, sasaran strategis, indikator target kinerja 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

2.1 TUGAS DAN FUNGSI

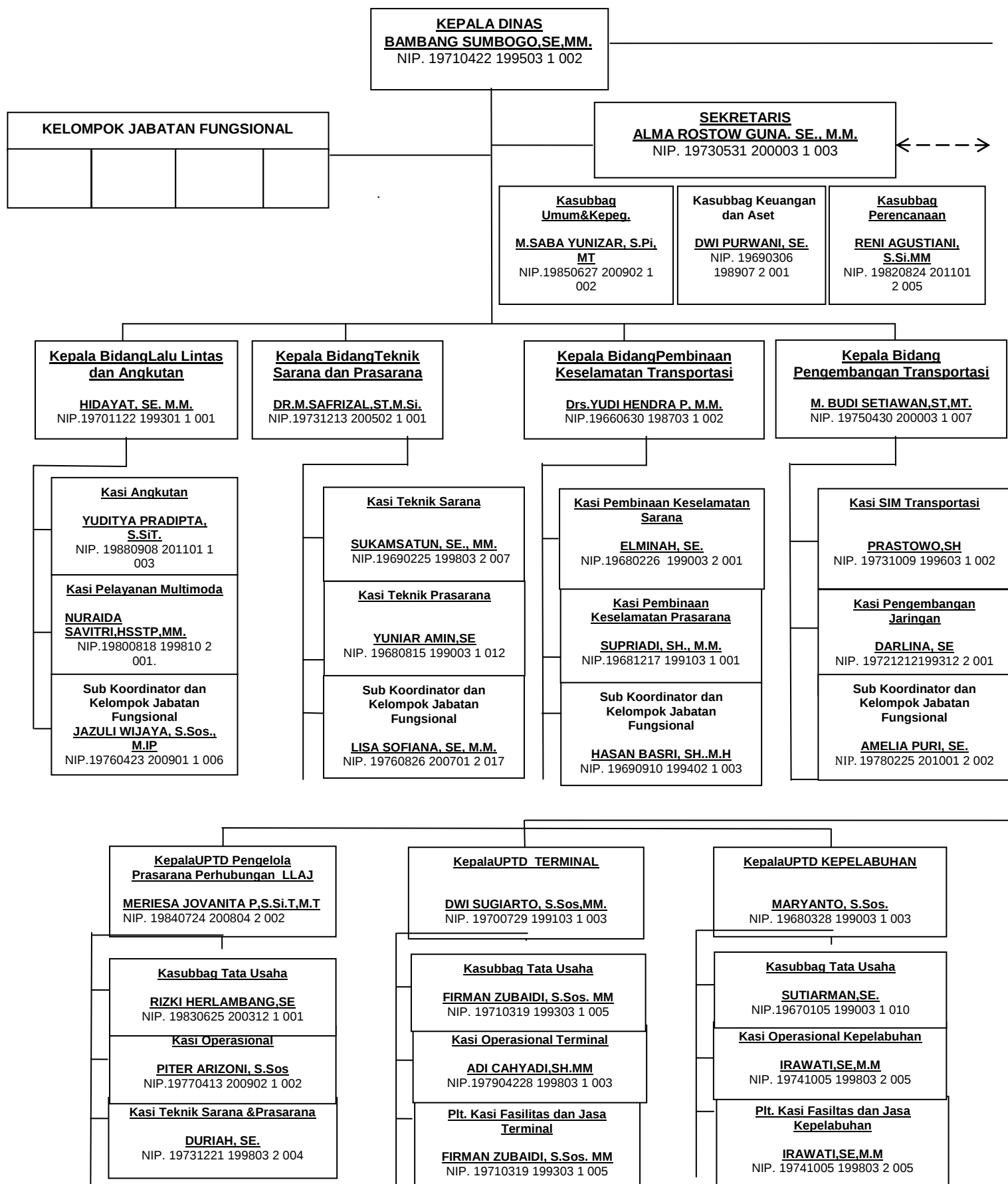
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Lampung nomor 74 tahun 2016 yang kemudian pada tahun 2021 disempurnakan kembali ke dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagai kewenangan Provinsi (desentralisasi) dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan, tugas desentralisasi dan tugas pembantu yang diberikan pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan, peraturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyusunan, kebijakan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan provinsi;
3. Penetapan lokasi, pengesahan rencana bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;

4. Penyusunan Jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan penyelenggaraan melebihi Wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
5. Penetapan tarif penumpang bus antara/kota dan tarif angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan Provinsi;
6. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
7. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
8. penyusunan dan penetapan rencana lalu lintas penyebrangan antar kabupaten/kota;
9. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian;
10. Penetapan lokasi, pengesahan desain dan persetujuan, pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG



2.3 SUMBER DAYA KEPEGAWAIAN

Sumberdaya aparatur merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terdiri dari 29 Jabatan Struktural dan 4 Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. Satu orang kepala Dinas, Eselon II.a;
- b. Lima orang Kepala Bidang, Eselon III.a;
- c. Tiga orang Kepala UPTD, Eselon III.a;
- d. Delapan belas orang Kepala Subag/Seksi, Eselon IV.a;
- e. Empat orang Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi diagram diatas pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada tahun 2023 berjumlah 91 orang dengan kualifikasi:

Pendidikan Strata III	: 1 orang (1%);
Pendidikan Strata II	: 22 orang (25%);
Pendidikan Strata I	: 32 orang (35%);
Pendidikan D.IV	: 1 orang (1%);
Pendidikan D.III	: 2 orang (2%);
Pendidikan SLTA	: 33 orang (36%);
Pendidikan SLTP	: 0 orang (0%).

Dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang terbanyak adalah golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebanyak 91 orang dengan golongan yaitu:

- a. Golongan IV : 16 Orang (17%);
- b. Golongan III : 61 Orang (67%);
- c. Golongan II : 14 Orang (16%);
- d. Golongan I : 0 Orang (0%).

Tabel 2.1 Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis pendidikan dan jabatan

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Jabatan Struktur	16	11	27
Jabatan Fungsional	2	2	4

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun,tabel dibawah ini memperlihatkan alokasi anggaran 2018-2023 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Alokasi anggaran 2018-2023 beserta serapannya

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
2018	Belanja Tidak Langsung	11.911.318.000	11.270.096.573	94,62%	
	Belanja Langsung	26.897.742.000	9.663.543.587	35,93%	
	Total Belanja	38.809.060.000	20.933.640.160	53,94%	
2019	Belanja Tidak Langsung	12.935.850.000	11.963.229.587	92,48%	
	Belanja Langsung	12.636.674.610	6.997.120.625	55,37%	

	Total Belanja	25.572.524.610	18.960.350.212	74,14%	
2020	Belanja Tidak Langsung	10.914.571.189	10.616.308.321	97,27%	
	Belanja Langsung	6.069.477.300	5.424.598.351	89,38%	
	Total Belanja	16.984.048.489	16.040.906.672	94,45%	
2021	Belanja Operasi	18.991.778.805	17.849.372.763	93,98%	
	Belanja Modal	1.231.766.345	1.176.626.175	95,52%	
	Total Belanja	20.223.545.151	19.025.998.938	94,08 %	
2022	Belanja Operasi	20.296.837.747	19.131.957.859	94,26%	
	Belanja Modal	3.048.797.300	3.031.415.532	99,43%	
	Total Belanja	23.345.635.047	22.163.373.391	94,94%	
2023	Belanja Operasi	21.703.948.009,95	20.621.266.372,00	95%	
	Belanja Modal	3.152.897.300,00	1.623.631.100,00	51,50%	
	Total Belanja	24.856.845.309,95	22.244.897.472,00	89,5%	

Berdasarkan realisasi keuangan alokasi APBD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selama periode 2018-2022 diketahui bahwa realisasi keuangan pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 89,5%.

2.4 ASET/MODAL

Aset Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Aset Dinas Tahun 2024

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung kantor	2 unit	2 unit	-	
2.	Gedung Terminal	2 unit	2 unit	-	
3.	Tanah	16 Lokasi	16 Lokasi		
3.	Gedung Jembatan Timbang	2 Unit	-	2 unit	Rusak Berat
4.	Mobil patroli dan operasional	14 unit	11 unit	3 unit	Rusak Berat
5.	Motor	7 unit	7 unit		

Kondisi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sampai dengan saat ini masih belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Sarana dan Prasarana kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang sudah berusia tua. Masih terdapat atap dan plafon yang bocor, meja dan kursidengan kondisi yang rusak dan segala keterbatasan, pelayanan terhadap masyarakat masih bisa berjalan dengan lancar (belum Maksimal), untuk itu masih diperlukan rehabilitas gedung kantor untuk mengganti atap kantor dan kursi meja yang sudah rusak.

Disamping itu kondisi prasarana jalan provinsi yang sudah 80% baik, tidak diikuti dengan perlengkapan jalan yang baik. Hal ini menyebabkan masih banyaknya Ruas jalan Provinsi yang belum dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan.

2.5 KINERJA PELAYANAN

Terdapat beberapa Program dan kegiatan ditahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 17,260,315,687.35,-.
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp. 3,050,000,000.00,-.
- 3) Program Pengelolaan Pelayarandengan anggaran sebesar Rp. 408.980.402,95,-.
- 4) Program Pengelolaan Perkeretaapian anggaran sebesar Rp. 30,000,000.00,-.

Sedangkan untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024, terdiri dari 20 (dua puluh) Kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 451,788,000,- dengan sub kegiatan :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.339.778.000,-.
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00,-.
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 11,943,019,584.40 dengan Sub Kegiatan :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp. 11.883.019.584,40.
 - 2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
 - 2.3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 10,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 484,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya anggaran sebesar Rp. 153.000.000,-.
 - 4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran sebesar Rp. 181.000.000,-.
 - 4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.810,000,000,-dengan Sub Kegiatan :
 - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-.
 - 5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.
 - 5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-.

- 5.4 Penyediaan Bahan/Material anggaran sebesar Rp. 98.000.000,-.
 - 5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-.
 - 5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp.330,400,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp. 127.400.000,-.
 - 6.2 Pengadaan Mebel anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - 6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp. 123.000.000,-.
 - 6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 2.679.108.102,95 dengan Sub Kegiatan:
 - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-.
 - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp. 330.000.000,-.
 - 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebesar Rp. 2.337.108.102,95.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran sebesar Rp. 552,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-.

- 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp. 392.000.000,-.
 - 8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - 8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi anggaran sebesar Rp. 470,000,000,- dengan Sub Kegiatan :
 - 9.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi anggaran sebesar Rp. 420.000.000,-.
 - 9.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 1,000,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 10.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-.
 - 10.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B anggaran sebesarRp. 445,000,000,- dengan Sub Kegiatan :
 - 11.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - 11.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B anggaran sebesar Rp. 345.000.000,-.

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp.185,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 12.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 12.2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 12.3 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-.
 - 12.4 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.

- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan anggaran sebesar Rp. 150,000,000,- dengan Sub Kegiatan :
 - 13.1 Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
 - 13.2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
 - 13.3 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp.575,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 14.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

14.2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-.

- Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp.150,000,000,- dengan Sub Kegiatan:

15.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dengan Sub Kegiatan:

16.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-.

- Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan Sub Kegiatan:

17.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa

Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 325,000,000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 18.1 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 18.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 75,000,000,-.

- Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 19.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan Sub Kegiatan:
 - 20.1 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-.

2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

1) Tantangan :

- a) Kondisi prasarana dan sarana perhubungan yang sudah berumur tua dan terbatasnya anggaran untuk pembangunan baru. Kondisi prasarana/sarana perhubungan yang sudah tua sangat berpengaruh terhadap kinerja operasional. Penggantian secara menyeluruh terhadap peralatan yang ada akan mengalami kesulitan dikarenakan keterbatasan anggaran. Peralatan perhubungan yang bersifat mekanik dengan kemajuan teknologi digital terus berkembang berpengaruh terhadap kualitas dan akurasi data yang dihasilkan;
- b) Masih banyaknya wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan pelayanan perhubungan akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Biaya penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang mahal merupakan salah satu kendala jangkauan pelayanan perhubungan ke wilayah terpencil;
- c) Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi yang dapat memenuhi harapan masyarakat baik kenyamanan, keamanan dan keselamatan sehingga perlu melakukan pembenahan secara bertahap. Kondisi yang masih menemui hambatan dan kendala dalam peningkatan pelayanan dan penggunaan prasarana/sarana transportasi adalah kuantitas dan kualitas sarana angkutan yang masih belum optimal;
- d) Peningkatan kinerja operasional dipengaruhi ketersediaan prasarana, sarana dan sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan sarana penunjang dalam mendukung kinerja operasional akan mempengaruhi produktivitas kinerja;
- e) Faktor keselamatan dan ketertiban penyelenggaraan transportasi merupakan tujuan penyelenggaraan transportasi.

Perilaku masyarakat dan aparat dalam mewujudkan keselamatan dan ketertiban sangat dibutuhkan kedisiplinan oleh semua pihak. Aspek kedisiplinan bagi pengguna prasarana dan sarana transportasi dari tahun ke tahun masih menemui kendala untuk ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan dengan berbagai cara belum terlihat hasilnya;

- f) Masih kurangnya kesadaran berlalulintas masyarakat dan pengusaha angkutan serta pengemudi. Selain itu hambatan lainnya adalah perilaku kurang disiplin dan tidak tertib dan cenderung melanggar. Upaya pembinaan baik yang bersifat teknis dan umum kepada aparat, operator dan pengguna jasa transportasi belum mampu menekan menurunnya disiplin masyarakat;
- g) Dominasi kendaraan pribadi sebagai moda transportasi darat, menyulitkan pengusaha angkutan umum untuk mengembangkan bisnis di bidang angkutan umum;
- h) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal untuk mengurangi kemacetan, khususnya di ruas jalan perkotaan di Provinsi Lampung.

2) Peluang:

- a) Perbaiki secara bertahap dengan mengganti komponen utama akan menambah umur teknis sarana/prasarana yang ada. Penyesuaian kondisi anggaran pembangunan baru, dapat dilaksanakan secara bertahap serta penambahan rambu -rambu lalu lintas dan sarana perhubungan lainnya;
- b) Upaya menjangkau pelayanan transportasi sampai wilayah pelosok terpencil tidak cukup terpenuhi dari sektor perhubungan saja. Keterpaduan dengan instansi terkait dalam menjangkau wilayah terpencil akan tercapai secara sinergis dengan melaksanakan program terpadu. Upaya mengatasi

permasalahan jangkauan pelayanan ke pelosok wilayah terpencil dengan menyiapkan program prioritas dan program keperintisan dengan pendanaan secara bertahap dan berkelanjutan;

- c) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah peningkatan kualitas pelayanan, masalah disiplin, dengan membuat program pembinaan teknis dan umum secara kontinyu meningkatkan kemampuan profesional SDM/operator/petugas;
- d) Untuk menunjang peningkatan kinerja operasional perlu ditambah sarana/prasarana serta fasilitas penunjang aparat dalam melakukan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dinas. Selain itu untuk peningkatan kemampuan teknis, operasional maupun umum bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugasnya. Meningkatkan kemampuan professional SDM operator/awak angkutan dengan penyelenggaraan diklat teknis dan penyuluhan seperti Diklat Nahkoda Layar Motor, Diklat Pemeriksa Roda Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan AKUT (Angkutan Kendaraan Umum Teladan) dan pembinaan disiplin angkutan umum;
- e) Pengembangan angkutan massal perkotaan (Bus Rapid Transit) untuk mengatasi kemacetan akibat banyaknya kendaraan pribadi. Dilakukan dengan reformasi angkutan massal dengan penerapan BRT;
- f) Penambahan simpul terminal Tipe B; fasilitas pendukung seperti lampu lalu lintas, rambu, pagar pengaman, deliniator, penambahan unit pengujian kendaraan bermotor, rehabilitasi, relokasi, serta pembangunan baru jembatan timbang, terutama di jalur lintas timur, peningkatan keselamatan dengan memasang pintu perlintasan terutama di lokasi yang rawan kecelakaan dan volume lalu lintas tinggi sesuai dengan

spesifikasi teknis yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI;

- g) Perlunya pembinaan, sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat dan pengusaha angkutan serta pengemudi angkutan tersebut;
- h) Pengembangan angkutan kereta api dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan seperti: pengembangan infrastruktur rel khusus batubara melalui sinergitas dengan pihak swasta, pengembangan kereta api *feeder* sebagai angkutan massal perkotaan, pembangunan jalur *short cut/long cut* untuk menghindari kemacetan di ruas jalan perkotaan karena perlintasan sebidang KA, peralihan angkutan peti kemas dari jalan raya ke kereta api, Operasional KA Premium Kuala Stabas menambah aksesibilitas baru dari/ke Kabupaten Way Kanan dari Pusat Kota Bandar Lampung;
- i) FS trase Akses KA Bandara yang menjadi prioritas Renja Ditjen KA. Tahun 2024;
- j) Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai alternatif angkutan darat, seperti: pengembangan potensial arus barang melalui angkutan sungai di Way Seputih dan Teladas. Daerah dengan angkutan perairan daratan sebagai alternatif angkutan darat untuk mendukung pengembangan kawasan dan perekonomian masyarakat pesisir dan pedalaman. Pengembangan angkutan penyeberangan lain selain Bakauheni;
- k) Pengembangan moda laut seperti pengendalian operasional pelabuhan khusus, pengembangan pelabuhan rakyat dan angkutan laut perintis akan diarahkan untuk mengantisipasi mobilitas barang melalui laut. Kesiapan fasilitas pelabuhan yang memadai sesuai hirarki peran dan fungsi pelabuhan lokal, regional, nasional dan internasional untuk melayani kapal

pelayaran rakyat, nasional dan asing. Diantaranya pembangunan prasarana dan sarana serta manajemen berstandar internasional Pelabuhan Panjang menjadi Pelabuhan Laut Internasional. Sebagai antisipasi P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Kementerian Perhubungan ke Pemerintah Daerah sebagai implementasi UU 23 Tahun 2014, harus diikuti dengan Peningkatan SDM dibidang Kepelabuhanan;

- I) Pengembangan angkutan udara seperti: pengembangan pelayanan dan penambahan rute penerbangan dari Bandara Internasional Radin Inten II Lampung ke Kota-kota besar di Indonesia dan Penerbangan Internasional sebagai stimulant Investor untuk berinvestasi di Provinsi Lampung; Pengoperasian dan pengembangan Bandar Udara M. Taufik Kemas sebagai alternatif angkutan udara dari dan ke Kabupaten Pesisir Barat. Pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan yang standar dan antisipasi penanggulangan bencana alam, MoU pemprov, pemkab dan pihak LanudAD Bandara Gatot Subroto menjadi bandara penerbangan sipil. Pengembangan ini terus diupayakan mengingat sangat penting dan strategis untuk membuka keterisolasian dan pengembangan perekonomian masyarakat di perbatasan Sumatera Selatan.

2.7 RENCANA AKSI TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mengelola anggaran sebesar 20,765,315,687.35,-Dari jumlah pagu anggaran tersebut didukung oleh 4 (empat) Program dan 20(dua puluh) Kegiatan serta 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024 memuat pelaksana tugas pokok dan fungsi dalam rangka untuk mendukung visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 -2024. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dituangkan ke dalam program dan kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan SKPD untuk dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung merumuskan misi ke -4 (empat) yaitu Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial, melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional dan monumental.Pembangunan infrastruktur mencakup transportasi darat, air, sungai, udara, laut dan perkeretaapian yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi dalam dan luar negeri demi untuk pengembangan daerah. Secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat daerah.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memiliki beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan ditahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan sebagai berikut :

A. SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA RASIO KONEKTIVITAS ANGKUTAN SESUAI KEWENANGAN PROVINSI DENGAN INDIKATOR KINERJA RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI MEMILIKI TARGET CAPAIAN KINERJA SEBESAR 73%.

I. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini merupakan salah satu dari 4 (empat) program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan memiliki indikator program yakni persentase pengelolaan pelayaran dengan target kinerja 100%. Program ini memiliki kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung berjalannya IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kegiatan dan sub kegiatan dari program pengelolaan pelayaran yang terdiri dari ;

1. Kegiatan: Penerbitan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

Kegiatan ini memiliki indikator kegiatan persentase pelabuhan pengumpan regional yang dikelola dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai IKU rasio konektivitas provinsi yang telah ditargetkan, yaitu ;

- 1.1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi angkutan perairan pelabuhan penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut tally mandiri dan depo peti kemas.

sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas (perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat yang memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah membuat persiapan administrasi kegiatan sebanyak 3 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah membuat laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa sebanyak 6 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah membuat laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa sebanyak 9 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa sebanyak 12 laporan.

1.2. Sub kegiatan : Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional.

sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara yang memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah membuat persiapan administrasi keperluan kegiatan sebanyak 1 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya operasional kegiatan sebanyak 2 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya operasional kegiatan sebanyak 3 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya operasional kegiatan sebanyak 5 unit.

1.3. Sub kegiatan : Pembangunan Pelabuhan pengumpan regional.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun yang memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan kelengkapan administrasi kegiatan sebanyak 0 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah persiapan kelengkapan administrasi kegiatan sebanyak 0 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah pembuatan kajian pendalaman alur sebanyak 1 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya kajian pendalaman alur sebanyak 1 unit.

II. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini merupakan salah satu dari 4 (empat) program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan memiliki indikator program yakni Meningkatnya pengelolaan perkeretaapian dengan target kinerja 100%. Program ini memiliki kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung berjalannya IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kegiatan dan sub kegiatan dari program pengelolaan perkeretaapian yang terdiri dari;

1. Kegiatan : Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah kereta api dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai IKU rasio konektivitas provinsi yang telah ditargetkan, yaitu ;

1.1. Sub kegiatan : Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan pelaksanaan administrasi kegiatan sebanyak 0 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah persiapan pelaksanaan administrasi kegiatan sebanyak 0 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah rapat sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian sebanyak 1 dokumen.

III. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan (LLA)

Program ini merupakan salah satu dari 4 (empat) program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan memiliki indikator program yakni Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan target kinerja 80%. Program ini memiliki kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung berjalannya IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kegiatan dan sub kegiatan dari program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang terdiri dari;

1. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B .

kegiatan ini memiliki indikator Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai IKU rasio konektivitas provinsi yang telah ditargetkan, yaitu ;

1.1. Sub kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung).

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara yang memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 0 unit;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah penentuan lokasi dan rencana rehabilitasi terminal sebanyak 1 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terminal sebanyak 2 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terminal sebanyak 2 Unit.

1.2. Sub kegiatan : Peningkatan kapasitas sdm pengelola terminal tipe B.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Kebutuhan Kompetensi SDM pengelola Terminal Tipe B yang Terpenuhi yang memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan operasional terminal tipe B sebanyak 11 orang;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah dengan terlaksananya kegiatan operasional Terminal Mulyojati, Terminal Propau dan Terminal Bakauheni sebanyak 11 orang;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah dengan terlaksananya kegiatan operasional Terminal Mulyojati, Terminal Propau dan Terminal Bakauheni sebanyak 11 orang;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah dengan terlaksananya

kegiatan operasional Terminal Mulyojati, Terminal Propau dan Terminal Bakauheni sebanyak 11 orang.

2. Kegiatan : Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan yang memiliki indikator kegiatan Persentase Dokumen Pengembangan Pelayanan, Buku Perhubungan dalam Angka dan ketersediaan teknologi sektor pelayanan jasa transportasi dengan memiliki target kinerja 25%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai IKU rasio konektivitas provinsi yang telah ditargetkan, yaitu ;

- 2.1. Sub kegiatan : Perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi memiliki sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah dengan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah dengan membuat kajian pemanfaatan Pelabuhan Teluk Betung sebanyak 1 dokumen;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah dengan membuat kajian pemanfaatan Pelabuhan Teluk Betung sebanyak 2 dokumen;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah dengan tersedianya kajian pemanfaatan Pelabuhan Teluk Betung sebanyak 2 dokumen;

3. Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini memiliki indikator kegiatan 'Persentase tertib administrasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai IKU rasio konektivitas provinsi yang telah ditargetkan,yaitu ;

3.1. Sub kegiatan : Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan memiliki sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah dengan melakukan Persiapan Administrasi Kegiatan sebanyak 100 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya operasional kegiatan pengawasan perijinan pengangkutan AKDP dan AJDP sebanyak 200 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya operasional kegiatan pengawasan perijinan pengangkutan AKDP dan AJDP sebanyak 300 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya operasional kegiatan pengawasan perijinan pengangkutan AKDP dan AJDP sebanyak 400 unit.

3. Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi. Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kajian Jaringan LLAJ Provinsi dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai IKU rasio konektivitas provinsi yang telah ditargetkan,yaitu ;

3.1. Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang memiliki target sebagai berikut

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 0 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 0 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah membuat Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah Tersedianya Dokumen Detail Engineering Design (DED) sebanyak 1 dokumen;

3.2. Sub kegiatan : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah dengan melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 2 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya dokumen administrasi kegiatan sebanyak 2 dokumen.

B. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DENGAN INDIKATOR SASARAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI MEMILIKI TARGET CAPAIAN KINERJA SEBESAR 86%.

I. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan (LLA)

Program ini merupakan salah satu dari 4 (empat) program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan memiliki indikator program yakni Persentase Penyediaan Angkutan Umum Jasa Transportasi dengan target kinerja 80%. Program ini memiliki kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung berjalannya IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kegiatan dan sub kegiatan dari program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang terdiri dari;

1. Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Indeks kepuasan masyarakat yang telah ditargetkan, yaitu ;

- 1.1. Sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya operasional kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya operasional kegiatan sebanyak 2 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya operasional kegiatan sebanyak 2 dokumen.

1.2. Sub kegiatan : Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah terlaksananya kegiatan operasional pengamanan lalu lintas angkutan lebaran sebanyak 1 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya kegiatan operasional pengamanan lalu lintas angkutan haji sebanyak 2 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya kegiatan operasional pengamanan lalu lintas angkutan sebanyak 3 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya kegiatan

operasional pengamanan lalu lintas angkutan natal dan tahun baru sebanyak 4 laporan.

C. SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DENGAN INDIKATOR SASARAN PRESENTASE FASILITAS KESELAMATAN JALAN YANG TERPASANG SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS MEMILIKI TARGET CAPAIAN KINERJA SEBESAR 45%.

I. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan (LLA)

Program ini merupakan salah satu dari 4 (empat) program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan memiliki indikator program yakni Persentase Penyediaan Angkutan Umum Jasa Transportasi dengan target kinerja 80%. Program ini memiliki kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung berjalannya IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kegiatan dan sub kegiatan dari program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan yang terdiri dari;

1. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi.
kegiatan ini memiliki indikator Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang memiliki indikator kegiatan Persentase fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi yang terpasang dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

- 1.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 100 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 200 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 300 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 400 unit.

1.2. Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 2 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan penyediaan administrasi kegiatan sebanyak 4 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan pemeliharaan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan sebanyak 7 unit;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya pemeliharaan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan sebanyak 10 unit.

2. Kegiatan : Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Keselamatan di Jalan Provinsi dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan,yaitu ;

2.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 Laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya operasional kegiatan dan rapat koordinasi pemantauan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 2 Laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah penyusunan laporan kegiatan pemantauan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 3 Laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya laporan kegiatan pemantauan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 4 Laporan.

2.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi keselamatan LLAJ sebanyak 2 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan penyusunan laporan Monitoring Terminal Tipe B sebanyak 3 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan penyusunan laporan Monitoring Terminal Tipe B sebanyak 4 laporan.

2.2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 2 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum sebanyak 3 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya laporan kegiatan sosialisasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum sebanyak 4 laporan.

3. Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi.

Kegiatan ini memiliki indikator kegiatan Persentase pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai

Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

3.1. Sub kegiatan : Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 0 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 0 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya dokumen administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen.

3.2. Sub kegiatan : Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.

sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 27 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah Penyediaan Administrasi Kegiatan sebanyak 54 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan pengadaan Water Barrier, Traffic Cone dan rambu lalu lintas portabel sebanyak 82 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terpasangnya Water Barrier, Traffic Cone dan rambu lalu lintas portabel sebanyak 110 unit.

3.3. Sub kegiatan : Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi (pengendalian ODOL) memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah terlaksananya operasional kegiatan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL) sebanyak 3 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya operasional kegiatan

Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL) sebanyak 6 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya operasional kegiatan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL) sebanyak 9 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan penyusunan laporan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL) sebanyak 12 laporan.

3.4. Sub kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan penyediaan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 2 laporan;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya laporan administrasi kegiatan 2 laporan.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan salah satu dari 4 (empat) program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan memiliki indikator program yakni Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 100%. Program ini memiliki kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung berjalannya IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kegiatan dan sub kegiatan dari program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi yang terdiri dari;

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase pelayanan perkantoran yang dilaksanakan dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

1.1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 2 dokumen;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan sebanyak 4 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan sebanyak 6 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perhubungan sebanyak 9 dokumen.

1.2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah penyediaan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 2 laporan;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya laporan administrasi kegiatan sebanyak 3 laporan.

1.3. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya kegiatan pengumpulan data buku Perhubungan Dalam Angka sebanyak 1 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya kegiatan pengumpulan data buku Perhubungan Dalam Angka sebanyak 2 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya kegiatan pengumpulan data buku Perhubungan Dalam Angka sebanyak 3 laporan.

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

kegiatan ini memiliki indikator Persentase tercapainya tertib administrasi keuangan perangkat daerah dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

2.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah layanan pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah terlaksananya pembayaran gaji PNS dan tunjangan sebanyak 91 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya pembayaran gaji PNS dan tunjangan sebanyak 91 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya pembayaran gaji PNS dan tunjangan sebanyak 91 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya pembayaran gaji PNS dan tunjangan sebanyak 91 orang.

2.2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah penyediaan administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 2 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya dokumen administrasi kegiatan sebanyak 3 dokumen.

2.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 1 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan penyediaan administrasi kegiatan sebanyak 3 dokumen;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 5 dokumen;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya dokumen administrasi kegiatan sebanyak 7 dokumen.

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. kegiatan ini memiliki indikator Persentase tercapainya tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

3.1. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan persiapan administrasi kegiatan sebanyak 0 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah penyediaan administrasi kegiatan sebanyak 0 laporan;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah tersedianya laporan administrasi kegiatan sebanyak 1 laporan.

4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase tercapainya kapasitas sumber daya ASN yang berkualitas dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

4.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 38 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 76 paket;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 114 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 153 paket;

4.2. Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 2 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 4 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 6 orang;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 10 orang.

4.3. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi) sebanyak 12 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi) sebanyak 24 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi) sebanyak 36 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi) sebanyak 50 orang.

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

kegiatan ini memiliki indikator Persentase tercapainya tertib administrasi umum perangkat daerah dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

4.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 6 paket;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor sebanyak 9 paket;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 12 paket.

4.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 3 paket;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 6 paket;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 9 paket;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 12 paket.

4.3. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 3 paket;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 6 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 9 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 12 paket.

4.4. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Bahan/Material sebanyak 3 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyediaan Bahan/Material sebanyak 6 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Bahan/Material sebanyak 9 paket;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Bahan/Material sebanyak 12 paket.

4.5. Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Rapat Dinas) memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 3 paket;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 6 paket;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 9 paket;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 paket.

4.6. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan sebanyak 27 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan sebanyak 55 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan sebanyak 85 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan sebanyak 117 laporan.

5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

kegiatan ini memiliki indikator Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

5.1. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 0 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 1 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 0 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 0 unit.

5.2. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Pengadaan Mebel sebanyak 1 paket;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Pengadaan Mebel sebanyak 1 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Pengadaan Mebel sebanyak 2 paket;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Pengadaan Mebel sebanyak 2 paket.

5.3. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 1 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 1 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 2 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 2 unit.

5.4. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 0 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 1 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 0 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 0 unit.

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini memiliki indikator Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

6.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 3 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan melakukan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 6 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 9 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan.

6.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 3 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 6 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 9 laporan;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 laporan.

6.3. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. sub sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Gaji PTHL, OB dll) memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll) sebanyak 79 orang;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll) sebanyak 79 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll) sebanyak 79 orang;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll) sebanyak 79 orang.

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini yang memiliki indikator Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan memiliki target kinerja 100%. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang berperan penting dalam mewujudkan nilai Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang yang telah ditargetkan, yaitu ;

7.1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang

Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 2 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 2 unit.

7.2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya memiliki target sebagai berikut;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 2 unit;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 5 unit;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 8 unit;

➤ Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4

Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 11 unit.

7.3. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 6 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 12 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 18 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 24 unit.

7.4. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki target sebagai berikut;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -1
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan pertama adalah melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 0 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -2
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan kedua adalah melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 0 unit;

- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -3
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan ketiga adalah melakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 0 unit;
- Pelaksanaan sub kegiatan triwulan ke -4
Target pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 di triwulan keempat adalah melakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.

3.1 MATRIK RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN & SUBKEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET /TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET /TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET /TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Terwujudnya Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	1	10%	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pengelolaan pelayaran	1	25%	Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang dikelola	1	25%		V	V	V	V	
											2	50%		V	V	V	V	
											3	75%		V	V	V	V	
											4	100%		V	V	V	V	
			2	20%			2	50%	Sub Kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun	1	0 Unit	Persiapan Kelengkapan Administrasi Kegiatan	V	V	V	V	
			3	60%			3	75%			2	0 Unit	Persiapan Kelengkapan Administrasi Kegiatan	V	V	V	V	
			4	73%			4	100%			3	1 Unit	Pembuatan Kajian Pendalaman Alur	V	V	V	V	
											4	1 unit	Tersedianya Kajian Pendalaman Alur	V	V	V	V	
									Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan n Pelabuhan Pengumpan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan	1	1 unit	Persiapan Administrasi Keperluan Kegiatan	V	V	V	V	
											2	2 unit	Terlaksananya Operasional Kegiatan	V	V	V	V	
											3	3 unit	Terlaksananya Operasional Kegiatan	V	V	V	V	

									Regional	terpelihara	4	5 unit	Terlaksananya Operasional Kegiatan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.	1	3 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	6 laporan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa	v	v	v	v
											3	9 laporan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa	v	v	v	v
											4	12 laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa	v	v	v	v
					Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya pengelolaan perkeretaapian	1	25%	Kegiatan : Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase koordinasi antar mitra perhubungan dalam penyelesaian masalah Kereta Api	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v

								Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	1	0 dok	Persiapan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
						2	50%	Penetapan Jaringan	Penetapan Jaringan	2	0 dok	Persiapan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
						3	75%	Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur	Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur	3	1 dok	Rapat Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	v	v	v	v
						4	100%	Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	4	1 dok	Tersedianya Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	v	v	v	v
					Program Penyeleng- araan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	1	20%	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase kajian Jaringan LLAJ Provinsi	1	25%		v	v	v	v
										2	50%		v	v	v	v
										3	75%		v	v	v	v
										4	100%		v	v	v	v
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	0 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
						2	40%			2	0 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
						3	60%			3	1 dok	Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED)	v	v	v	v
						4	80%			4	1 dok	Tersedianya Dokumen Detail Engineering Design (DED)	v	v	v	v
								Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana	1	1 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
										2	1 dok	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
										3	2 dok	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v

									Induk Jaringan LLAJ Provinsi	4	2 dok	Tersedianya Dokumen Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
								Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	1	25%		v	v	v	v
										2	50%		v	v	v	v
										3	75%		v	v	v	v
										4	100%		v	v	v	v
								Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	0 Unit	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
										2	1 Unit	Penentuan Lokasi dan Rencana Rehabilitasi Terminal	v	v	v	v
										3	2 Unit	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Terminal	v	v	v	v
										4	2 Unit	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Terminal	v	v	v	v
								Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi SDM pengelola Terminal Tipe B yang Terpenuhi.	1	11 org	Persiapan Operasional Terminal Tipe B	v	v	v	v
										2	11 org	Terlaksananya Kegiatan Operasional Terminal Mulyojati, Terminal Propau dan Terminal Bakauheni	v	v	v	v
										3	11 org	Terlaksananya Kegiatan Operasional Terminal Mulyojati, Terminal Propau dan Terminal Bakauheni	v	v	v	v
										4	11 org	Terlaksananya Kegiatan Operasional Terminal Mulyojati, Terminal Propau dan Terminal Bakauheni	v	v	v	v
								Kegiatan : Penetapan Kawasan Perkotaan	Persentase Dokumen Pengembang an	1	25%		v	v	v	v
										2	50%		v	v	v	v

									untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelayanan, Buku Perhubungan dalam Angka dan ketersediaan teknologi sektor pelayanan jasa transportasi	3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	1 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	1 dok	Pembuatan Kajian Pemanfaatan Pelabuhan Teluk Betung	v	v	v	v
											3	2 dok	Pembuatan Kajian Pemanfaatan Pelabuhan Teluk Betung	v	v	v	v
											4	2 dok	Tersedianya Kajian Pemanfaatan Pelabuhan Teluk Betung	v	v	v	v
									Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase tertib administrasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v

									Provinsi	Provinsi							
									Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1	100 unit	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	200 unit	Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengawasan Perijinan Pengangkutan AKDP dan AJDP	v	v	v	v
											3	300 unit	Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengawasan Perijinan Pengangkutan AKDP dan AJDP	v	v	v	v
											4	400 unit	Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengawasan Perijinan Pengangkutan AKDP dan AJDP	v	v	v	v
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	1	15%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase Penyediaan Angkutan Umum Jasa Transportasi	1	20%	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
			2	30%			2	40%	Sub Kegiatan : Penyediaan	Jumlah Armada	1	1 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v

			3	60%			3	60%	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	1 dok	Terlaksananya Operasional Kegiatan	v	v	v	v
			4	86%			4	80%			3	2 dok	Terlaksananya Operasional Kegiatan	v	v	v	v
											4	2 dok	Terlaksananya Operasional Kegiatan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1	1 laporan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Lebaran	v	v	v	v
											2	2 laporan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Haji	v	v	v	v
											3	3 laporan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas	v	v	v	v
-	-	-	-								4	4 laporan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Natal dan Tahun Baru	v	v	v	v
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis	1	10%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan LLAJ	Persentase peningkatan fasilitas perlengkapan dan keselamatan untuk jaringan jalan Provinsi	1	20%	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1	100 unit	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v

			2	20%			2	40%	Provinsi		2	200 unit	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	v	v	v	v
			3	30%			3	60%			3	300 unit	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Marka Jalan Provinsi	v	v	v	v
			4	45%			4	80%			4	400 unit	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Marka Jalan Provinsi	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	1	2 unit	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	4 unit	Penyediaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											3	7 unit	Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan	v	v	v	v
											4	10 unit	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan	v	v	v	v
									Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Desain Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1	0 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	0 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											3	1 dok	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v

											4	1 dok	Tersedianya Dokumen Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	1	27 unit	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
								2			54 unit	Penyediaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v	
								3			82 unit	Pengadaan Water Barrier, Traffic Cone dan Rambu Lalu Lintas Portabel	v	v	v	v	
								4			110 unit	Terpasangnya Water Barrier, Traffic Cone dan Rambu Lalu Lintas Portabel	v	v	v	v	
									Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawas dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	3 laporan	Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL)	v	v	v	v
								2			6 laporan	Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL)	v	v	v	v	
								3			9 laporan	Terlaksananya Operasional Kegiatan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL)	v	v	v	v	
								4			12 laporan	Tersedianya Laporan Operasional Kegiatan Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL)	v	v	v	v	
									Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk	1	1 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
								2			1 laporan	Penyediaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v	
								3			2 laporan	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v	

										Jaringan Jalan Provinsi	4	2 laporan	Tersedianya Laporan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
									Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Keselamatan di Jalan Provinsi	1	25%		v	v	v	v
								2			50%		v	v	v	v	
								3			75%		v	v	v	v	
								4			100%		v	v	v	v	
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	1 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v	
										2	2 laporan	Terlaksananya Operasional Kegiatan dan Rapat Koordinasi Pemantauan Pengujian Kendaraan Bermotor	v	v	v	v	
										3	3 laporan	Penyusunan Laporan Kegiatan Pemantauan Pengujian Kendaraan Bermotor	v	v	v	v	
										4	4 laporan	Tersedianya Laporan Kegiatan Pemantauan Pengujian Kendaraan Bermotor	v	v	v	v	
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	1 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v	
										2	2 laporan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	v	v	v	v	
										3	3 laporan	Penyusunan Laporan Monitoring Terminal Tipe B	v	v	v	v	
										4	4 laporan	Tersedianya Laporan Monitoring Terminal Tipe B	v	v	v	v	
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit	Jumlah Laporan Inspeksi,	1	1 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v	

									dan Pemantauan Sistem	Audit dan Pemantauan Sistem	2	2 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
									Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3	3 laporan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	v	v	v	v
											4	4 laporan	Tersedianya Laporan Kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	v	v	v	v
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	25%	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perkantoran yang dilaksanakan	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
							2	50%			2	4 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	v	v	v	v
							3	75%			3	6 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	v	v	v	v
							4	100%			4	9 dok	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1	1 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	1 laporan	Penyediaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v

									Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2 laporan	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											4	3 laporan	Tersedianya Laporan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	1 laporan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Buku Perhubungan Dalam Angka	v	v	v	v
											3	2 laporan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Buku Perhubungan Dalam Angka	v	v	v	v
											4	3 laporan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Buku Perhubungan Dalam Angka	v	v	v	v
									Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	91 org	Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan	v	v	v	v
											2	91 org	Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan	v	v	v	v

											3	91 org	Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan	v	v	v	v
											4	91 org	Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS dan Tunjangan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	3 dok	Penyediaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											3	5 dok	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											4	7 dok	Tersedianya Dokumen Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1 dok	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	1 dok	Penyediaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											3	2 dok	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											4	3 dok	Tersedianya Dokumen Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
									Kegiatan : Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tercapainya tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada	1	0 laporan	Persiapan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											2	0 laporan	Penyediaan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
											3	1 laporan	Terlaksananya Administrasi Kegiatan	v	v	v	v

										SKPD	4	1 laporan	Tersedianya Laporan Administrasi Kegiatan	v	v	v	v
									Kegiatan : Administra si Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase tercapainya kapasitas sumber daya ASN yang berkualitas	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	38 stel	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	v	v	v	v
											2	76 stel	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	v	v	v	v
											3	114 stel	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	v	v	v	v
											4	153 stel	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	2 orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	v	v	v	v
											2	4 orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	v	v	v	v
											3	6 orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	v	v	v	v
											4	10 orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	v	v	v	v

									Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	12 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi)	v	v	v	v
											2	24 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi)	v	v	v	v
											3	36 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi)	v	v	v	v
											4	50 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (AKUT dan Pelajar Pelopor Tk. Provinsi)	v	v	v	v
									Kegiatan : Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya tertib administrasi umum perangkat daerah	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang disediakan	1	3 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	v	v	v	v
											2	6 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	v	v	v	v
											3	9 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	v	v	v	v

											4	12 paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3 paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v	v	v	v
								2			6 paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v	v	v	v	
								3			9 paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v	v	v	v	
								4			12 paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	v	v	v	v	
									Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	3 paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	v	v	v	v
								2			6 paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	v	v	v	v	
								3			9 paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	v	v	v	v	
								4			12 paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	v	v	v	v	
									Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	3 paket	Penyediaan Bahan / Material	v	v	v	v
								2			6 paket	Penyediaan Bahan / Material	v	v	v	v	
								3			9 paket	Penyediaan Bahan / Material	v	v	v	v	
								4			12 paket	Penyediaan Bahan / Material	v	v	v	v	

									Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3 paket	Fasilitasi Kunjungan Tamu	v	v	v	v
											2	6 paket	Fasilitasi Kunjungan Tamu	v	v	v	v
											3	9 paket	Fasilitasi Kunjungan Tamu	v	v	v	v
											4	12 paket	Fasilitasi Kunjungan Tamu	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	27 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	v	v	v	v
											2	55 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	v	v	v	v
											3	85 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	v	v	v	v
											4	117 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	v	v	v	v
									Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v

									Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	0 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v
											2	1 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v
											3	0 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v
											4	0 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	1 paket	Pengadaan Mebel	v	v	v	v
											2	1 paket	Pengadaan Mebel	v	v	v	v
											3	2 paket	Pengadaan Mebel	v	v	v	v
											4	2 paket	Pengadaan Mebel	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
											2	1 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
											3	2 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
											4	2 unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v

									Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0 unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	v	v	v	v
											2	0 unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	v	v	v	v
											3	0 unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	v	v	v	v
											4	1 unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	v	v	v	v
									Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah an Daerah	1	25%		v	v	v	v
											2	50%		v	v	v	v
											3	75%		v	v	v	v
											4	100%		v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3 laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	v	v	v	v
											2	6 laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	v	v	v	v
											3	9 laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	v	v	v	v

											4	12 laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	v	v	v	v
									Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	3 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v	v	v	v
								2			6 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v	v	v	v	
								3			9 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v	v	v	v	
								4			12 laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	v	v	v	v	
									Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	79 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll)	v	v	v	v
								2			79 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll)	v	v	v	v	
								3			79 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll)	v	v	v	v	
								4			79 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PTHL, OB dll)	v	v	v	v	
								Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	1	25%		v	v	v	v	
										2	50%		v	v	v	v	
										3	75%		v	v	v	v	
										4	100%		v	v	v	v	

									Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	V	V	V	V
											2	1 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	V	V	V	V
											3	2 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	V	V	V	V
											4	2 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	V	V	V	V
									Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	V	V	V	V
											2	5 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	V	V	V	V
											3	8 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	V	V	V	V

										4	11 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v
								Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	6 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
										2	12 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
										3	18 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
										4	24 unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v
								Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0 unit	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	v	v
										2	0 unit	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	v	v
										3	0 unit	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	v	v
										4	1 unit	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	v	v

Bandar Lampung, Maret 2024
KEPALA DINAS

BAMBANG SUMBOGO, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710422 199503 1 002

PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran, indikator sasaran suatu target capaian dan kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melaksanakan 3 (tiga) sasaran sebagai pendukung Visi Provinsi Lampung 2019-2024 "Infrastruktur Lampung Berjaya". Dari 3 (tiga) sasaran tersebut didukung oleh 4 (empat) Program yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kegiatan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan total anggaran 20,765,315,687.35,-

Rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah. Semoga Rencana Aksi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2024 menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di daerah untuk mencapai target kinerja tahunan serta mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2024

KEPALA DINAS,

BAMBANG SUMBOGO, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19710422 199503 1 002